



Evaluasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Jurusan Sejarah

Etmi Hardi^{1✉}, Ambiyar², Ishak Aziz³

Universitas Negeri Padang, Indonesia^{1,2,3}

e-mail : etmihardi@fis.unp.ac.id¹, ambiyar@ft.unp.ac.id², 06ishakaziz@gmail.com³

Abstrak

Pendidikan di perguruan tinggi saat ini memasuki babak baru yang terlihat dari pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang berorientasi pada peningkatan kompetensi mahasiswa yang lebih komprehensif, tidak hanya di bidang keilmuan, tetapi juga di bidang keahlian dan keterampilan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di jurusan sejarah. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dalam bentuk studi deskriptif, serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, diklasifikasikan atas unit-unit analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan yang diperoleh oleh Jurusan Sejarah dalam pelaksanaan kurikulum MBKM. Keberhasilan itu antara lain terlihat dengan peningkatan kompetensi keahlian mahasiswa. Sementara diantara persoalan yang muncul adalah kesulitan dalam mengimplementasikan beberapa program yang sesuai dengan karakteristik dan sifat keilmuan yang ada di Prodi Sejarah. Oleh sebab itu evaluasi menyeluruh terhadap program ini tentu perlu dilakukan untuk menemukan solusi yang lebih tepat di masa depan, sehingga berbagai persoalan dan kelemahan yang ada dalam MBKM dapat diselesaikan.

Kata Kunci: Evaluasi, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Jurusan Sejarah.

Abstract

Education in tertiary institutions is currently entering a new phase which can be seen from the implementation of the Merdeka Learning Kampus Merdeka (MBKM) curriculum, which is oriented towards a more comprehensive improvement of student competencies, not only in the scientific field, but also in other areas of expertise and skills. This study aims to find out the results of the implementation of the Merdeka Learning Kampus Merdeka (MBKM) program in the history department. This research is included in the qualitative research in the form of a descriptive study, as well as field data obtained through interviews, observation, and study of documents, classified into units of analysis. The results of this study indicate the success obtained by the Department of History in implementing the MBKM curriculum. This success can be seen, among other things, by increasing the competence of student expertise. Meanwhile, among the problems that arise are difficulties in implementing several programs that are in accordance with the characteristics and nature of the knowledge in the History Study Program. Therefore, a thorough evaluation of this program certainly needs to be carried out to find a more appropriate solution in the future, so that the various problems and weaknesses that exist in MBKM can be resolved.

Keywords: Evaluation, Independent Campus Learning Program (MBKM), Department of History.

Copyright (c) 2023 Etmi Hardi, Ambiyar, Ishak Aziz

✉ Corresponding author :

Email : etmihardi@fis.unp.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4500>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Pendidikan saat ini memasuki wajah baru dalam bentuk Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berorientasi pada penguasaan berbagai bidang keilmuan dan keterampilan mahasiswa, agar menjadi lulusan yang memiliki kompetensi secara komprehensif. Kebijakan MBKM digelontorkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di masa masa Covid 19 sedang merebak. MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Pelaksanaan MBKM membuka jalan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam bidang keilmuan yang tidak ada di dalam jurusan atau prodi-nya. Acuan yang digunakan dalam MBKM ini adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti program perkuliahan diluar perguruan tinggi berbeda paling lama dua semester, atau sepadan dengan 40 SKS, serta dapat mengikuti perkuliahan di jurusan/prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama selama satu semester atau sepadan dengan 20 SKS. Tentunya aturan tersebut menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan bagi dosen yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam mengimplementasikan kerjasama Kurikulum MBKM (Tohir M, 2020). MBKM mendorong agar mahasiswa memiliki beragam kompetensi yang tertuang dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 (Susetyo, 2020).

Pada level pelaksanaan, berbagai regulasi MBKM dilaksanakan oleh sejumlah pihak yang terkait, antara lain Perguruan Tinggi (Universitas), fakultas, jurusan/program studi, mahasiswa, dan mitra. Bagi pengelola perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) dengan ketentuan: 1). Mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, dan 2) Mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks (Dirjend Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020) .

Setiap unit/lembaga yang ada di Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan Kurikulum MBKM. Bagi pihak fakultas punya kewajiban untuk: 1). Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi, dan 2). Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan. Sementara, pihak Jurusan/program studi berkewajiban untuk: 1). Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi MBKM, 2). Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi, 3). Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya, 4). Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, dan 2). Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT disiapkan alternatif mata kuliah daring (Dirjend Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Bagi pihak mahasiswa memiliki kewajiban 1). Merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenal program mata kuliah/program yang akan diambil di luar jurusan/prodi, 2). Mendaftar program kegiatan luar jurusan/prodi, 3). Melengkapi persyaratan kegiatan luar jurusan/prodi, 4). mengikuti program kegiatan luar jurusan/prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Terakhir, kewajiban mitra adalah 1). Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi, dan 2). melaksanakan program kegiatan luar jurusan/prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK).

Jurusan Sejarah sebagai salah satu unit pendidikan yang berada di bawah payung Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNP, ikut terlibat dalam penyelenggaraan Program MBKM. Keterlibatan itu dimulai dengan penyusunan kurikulum MBKM pada tahun 2019, yang satu tahun kemudian dilanjutkan dengan ujicoba pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar dengan beberapa Prodi Pendidikan sejenis di Perguruan Tinggi lain, yakni Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Medan (Unimed). Pada tahun 2021 Program

Pertukaran Pelajar diperluas dengan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Riau (UNRI). Di samping itu pada tahun 2021 Jurusan Sejarah juga melibatkan beberapa mahasiswa dalam Program Permata yang dibuka langsung oleh Kemendikbud. Pada tahun bersamaan sebanyak 10 orang mahasiswa Jurusan Sejarah juga terlibat dalam Program Asistensi Mengajar (Kampus Mengajar) yang dibuka oleh kemendikbud.

Selama tiga tahun keterlibatan Jurusan Sejarah dalam Program MBKM tentunya ada keuntungan yang didapat oleh mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan ini, terutama dalam peningkatan kompetensi keilmuan, pedagogik, dan keterampilan. Demikian juga halnya dengan Jurusan Sejarah sendiri cukup banyak manfaat yang didapat dalam kegiatan ini. Sekalipun demikian berbagai persoalan juga muncul dalam pelaksanaan program MBKM, baik yang bersifat internal, maupun eksternal. Oleh sebab itu tulisan ini mencoba untuk melihat dan mengevaluasi pelaksanaan Program MBKM guna menemukan persoalan yang masih terjadi, serta menawarkan berbagai solusi yang berguna untuk pimpinan Jurusan ke depan dalam program MBKM. Beberapa hal yang ingin dievaluasi adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan Program MBKM di Jurusan Sejarah? 2). Apa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya? 3). Bagaimana solusi yang relevan untuk menyelesaikan kendala yang muncul dalam pelaksanaan MBKM di Jurusan Sejarah.

Evaluasi program adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang mengimplementasikan sebuah kebijakan yang telah dirancang sebelumnya. Kegiatan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan yang melibatkan sejumlah orang guna mengambil sebuah keputusan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana ketercapaian tujuan program yang telah dijalankan (Ambiyar dan Muharika Dewi, 2022). Hasil yang didapat dari sebuah evaluasi program dapat digunakan sebagai acuan kerja pada masa berikutnya (tindak lanjut), serta pengambilan keputusan penting pada masa selanjutnya.

Dari penelusuran literatur diperoleh beberapa tulisan yang relevan dengan pokok kajian ini. Pertama, artikel Handi Risza, dkk berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Oleh Pimpinan Universitas Paramida* (2022). Hasil temuan Handi Risza dkk menunjukkan bahwa pimpinan Universitas Paramida sudah memahami dengan baik program MBKM dengan menerapkan berbagai kebijakan dan sumber daya yang dapat mendukung program ini. Kedua, artikel Devi Wulandari, dkk dengan judul *Evaluasi implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Tingkat Program Studi: Studi di Universitas Paramadina* (2021). Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Program MBKM di delapan Prodi yang ada di Universitas Paramadina menunjukkan terdapatnya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan MBKM. Faktor pendukung adalah kebijakan, SDM Pendukung, dan kanal informasi. Sementara faktor penghambat justru berasal dari dosen dan mahasiswa sendiri. Ketiga, hasil riset Ida Ayu Triastuti dan Heribertus Sigit Prasetya berjudul *Evaluasi Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana* (2021) menunjukkan bahwa hampir separoh mahasiswa Fakultas Kedokteran UKDW tertarik dengan Program MBKM, terutama dalam bentuk Pertukaran Pelajar. Akan tetapi kebanyakan mahasiswa juga memiliki kekhawatiran dengan Program MBKM karena akan memperpanjang masa studi. Selanjutnya penelitian dari Miranti Yolanda Anggita dkk, tentang *Realisasi dan Evaluasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Studi Sarjana Fisioterapi Universitas Esa Unggul* (2021) menemukan bahwa sosialisasi Program MBKM masih kurang terhadap dosen dan mahasiswa. Di samping itu pelaksanaan Program MBKM belum bisa optimal di Prodi Fisioterapi karena kurang sesuai dengan kompetensi mahasiswa.

Penelitian sebelumnya kebanyakan hanyalah memaparkan tentang pelaksanaan MBKM di berbagai program studi, serta melihat berbagai persoalan yang muncul tanpa mencarikan solusi atau alternatif jalan keluar dari permasalahan yang ada. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan yang tidak hanya melihat realisasi pelaksanaan MBKM di Jurusan Sejarah dengan berbagai persoalannya, namun juga berusaha untuk menawarkan berbagai solusi yang bisa memberi jalan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Pentingnya penelitian ini dilakukan disebabkan MBKM tidak hanya menjadi sebuah program tawaran di perguruan tinggi, akan tetapi sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan seluruh jurusan atau program studi

yang ada. Di samping itu pelaksanaan MBKM di berbagai program studi dan jurusan di perguruan tinggi, seringkali menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi kampus, sehingga sudah selayaknya dilakukan penelitian tentang itu untuk memperkuat keyakinan orang-orang yang ragu terhadap efektifitas MBKM di perguruan tinggi.

Penelitian ini memberikan sebuah tawaran baru tentang bagaimana cara penyesuaian MBKM di tingkat bawah (prodi atau jurusan) di sebuah perguruan tinggi. Yang dimaksud dengan penyesuaian disini adalah dalam hal cara konversi mata kuliah dalam berbagai skema program MBKM. Sebab selama ini konversi mata kuliah adalah sesuatu yang membingungkan dan sering menjadi perdebatan di kalangan dosen dan mahasiswa. Seringkali pimpinan jurusan program studi kebingungan dalam melakukan konversi mata kuliah mahasiswa yang sudah melaksanakan sebuah skema yang ada dalam program MBKM.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Sejarah FIS UNP. Subjek penelitian terdiri dari pimpinan Jurusan, dosen, dan mahasiswa Jurusan Sejarah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber penelitian juga diperkaya dengan studi literatur melalui buku dan artikel yang relevan dengan kajian.

Sesuai dengan konsepsi evaluasi program sebagai kegiatan mengumpulkan informasi yang mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah dibentuk sebelumnya, dengan tujuan untuk mengukur dan mengetahui sejauhmana efektivitas sebuah program yang sudah dilaksanakan, maka data yang telah dikumpulkan juga diolah dengan menggunakan pendekatan evaluasi program, yakni menggunakan model CIPP/O. Sesuai dengan model ini ada lima aspek yang dipelajari dan dianalisis, yakni *Context*, *Input*, *Process*, *Product*, dan *Outcome*. *Context* berkaitan dengan perencanaan MBKM, *Input* adalah segala sesuatu yang akan berpengaruh terhadap program, *process* menyangkut implementasi program MBKM, *Product* menyangkut dengan manfaat Program MBKM, dan *Outcome* menyangkut dengan hasil dengan target yang terukur atau dapat juga dikatakan sebagai dampak dari Program MBKM.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dalam bentuk studi deskriptif. Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, diklasifikasikan atas unit-unit analisis. Unit analisis ditetapkan berdasarkan rumusan masalah. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen yakni: reduksi data, display data dan verifikasi (Sugiyono, 2009: 338-345).

Reduksi data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan secara berkelanjutan dan mendalam. Semakin sering penjarangan data dilakukan ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Guna mengatasi hal itu, maka setelah ke lapangan segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang data yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pencarian data selanjutnya, jika masih diperlukan.

Display data dilakukan sesudah mereduksi data yang telah diperoleh. Dengan mendisplaykan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Langkah selanjutnya adalah verifikasi data yang merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan bukti yang kuat, sehingga nantinya dapat menghasilkan kesimpulan penelitian yang valid dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi dan Regulasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan kemendikbud dalam bentuk Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi (Dirjend Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Dalam Program MBKM, mahasiswa dipersiapkan untuk menghadapi terjanagan badai yang mungkin akan terjadi di lautan, dalam arti di lapangan kerja dan di lingkungan masyarakat. Melalui Program MBKM mahasiswa diberikan pengalaman belajar lebih luas dari pada bidang ilmu yang digelutinya. Salah satunya dengan penerapan strategi dan metode pembelajaran yang lebih menantang dan berpusat pada mahasiswa, contohnya penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) atau Pembelajaran Berbasis Proyek (PJBL). Kesemuanya ini diperkirakan akan membiasakan mahasiswa untuk tanggap dengan keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya (Nurhayani, 2020).

Persyaratan umum dalam pelaksanaan MBKM adalah sebagai berikut: 1).Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi. 2). Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian, maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi 8 skema berikut:



Gambar 1 Kegiatan Pembelajaran MBKM

Berdasarkan gambar di atas terdapat 8 program MBKM yang dikembangkan, yakni: Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Kewirausahaan, Studi Proyek Independen, dan Membangun Desa/KKN (Dirjend Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Di samping itu juga ditetapkan Dasar Hukum MBKM sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi dalam mengembangkan diri dan melakukan berbagai kebijakan. Dasar hukum itu menyangkut tentang pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan status perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH). Seluruh kebijakan baru diatur dibawah payung hukum Permendikbud. Khusus MBKM menyangkut hak belajar di luar program studi selama tiga semester diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020.

Implementasi MBKM di Jurusan Sejarah FIS UNP

Berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi No.12 Tahun 2012 ditetapkan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak setiap Perguruan Tinggi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Tahap Perancangan kurikulum terdiri dari Penetapan Profil Lulusan, Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Penetapan bahan kajian, Pembentukan Mata Kuliah, dan Penyusunan matriks organisasi mata kuliah.

Pelaksanaan MBKM di Jurusan Sejarah disesuaikan dengan Visi-Misi Jurusan/Program Studi, Profil Lulusan, serta Capaian Pembelajaran. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi Jurusan dalam menentukan arah pengembangan Kurikulum MBKM yang terdiri dari delapan skema. Pemilihan skema dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Visi, Misi Jurusan, Profil Lulusan, dan Capain Pembelajaran. Visi Jurusan Sejarah dirumuskan: “Menjadi Jurusan/Program Studi terkemuka di kawasan Asia Tenggara dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi”. Sementara misi dirumuskan atas: 1). Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional di bidang keilmuan sejarah, dan pendidikan sejarah, 2). Melaksanakan penelitian dan publikasi global di bidang sejarah, dan 3). Melaksanakan kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi pada level nasional dan internasional.

Profil lulusan adalah postur yang diharapkan pada saat mahasiswa lulus atau menyelesaikan seluruh proses perkuliahannya, dan siap masuk ke lapangan kerja atau dunia industri sesuai dengan jenjang KKNI. Dalam hal ini profil lulusan Jurusan Sejarah yang diharapkan nantinya adalah sebagai: guru sejarah, peneliti sejarah, peneliti pendidikan sejarah, jurnalis, pramuwisata sejarah, pramuwisata budaya, penulis sejarah (buku sejarah, novel, dan sebagainya). Penetapan profil ini dilakukan melalui kajian mendalam lewat Forum Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak, *stakeholder*, dan pelacakan melalui *tracer study* alumni. Dari hasil kajian diperoleh informasi bahwa alumni Jurusan Sejarah tidak hanya bekerja sebagai guru/pengajar sejarah, tetapi juga pada sektor sektor lainnya, seperti peneliti sejarah, jurnalis dan pemandu wisata (*Dokumen Kurikulum Jurusan Sejarah Tahun 2020*, n.d.).

Berdasarkan Profil jurusan ditetapkan Capaian Pembelajaran, terdiri dari empat aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus). Dalam aspek sikap capaian pembelajaran yang diinginkan antara lain: bertakwa kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air, serta menunjukkan semangat kemandirian, dan kewirausahaan. Sementara dalam aspek pengetahuan capaian pembelajaran meliputi penguasaan keilmuan dasar pendidikan, penguasaan konsep dan teori dalam kajian ilmu sejarah dan pendidikan sejarah, serta menguasai metodologi penelitian sejarah dan pendidikan sejarah. Dalam pada itu Capaian Pembelajaran dalam aspek keterampilan dibagi atas dua bagian, yakni umum dan khusus. Keterampilan umum antara lain: kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif; kemampuan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; serta kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Sedangkan keterampilan khusus, antara lain: kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sejarah; kemampuan memanfaatkan teknologi informasi; serta kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan karya inovatif bagi masyarakat (*Dokumen Kurikulum Jurusan Sejarah Tahun 2020*, n.d.).

Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar di Jurusan Sejarah FIS UNP dimulai pada tahun 2019, yang pelaksanaan ujicobanya pertama kalinya dilakukan pada tahun itu juga terhadap mahasiswa angkatan 2018. Kemudian berlanjut pada tahun 2021 terhadap mahasiswa angkatan 2019, selanjutnya pada tahun 2022 terhadap mahasiswa angkatan 2020. Bentuk pelaksanaannya adalah Pertukaran Pelajar yang dilaksanakan pada Semester Januari- Juni 2021, Semester Januari - Juni 2020, dan Semester Januari-Juni 2022 (Wawancara dengan Ketua Jurusan Sejarah, Rusdi, 3 November 2022).

Bentuk Kegiatan Pertukaran Pelajar dikelola langsung oleh Jurusan Sejarah, dengan melibatkan Perguruan Tinggi Mitra sebagai berikut 1). Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Malang (UM), 2). Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Medan (Unimed), dan 3). Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau

(UNRI). Pola pertukaran adalah dengan mempertukarkan kelas secara utuh dengan kapasitas mahasiswa 20 orang, dan dengan jumlah sks yang sama sebesar 20 sks (Wawancara dengan Ketua Jurusan Sejarah, Rusdi, 3 November 2022).

Pada tahun 2019 Pertukaran Pelajar dilakukan dengan Prodi Pendidikan Sejarah Unimed, dengan kelas pertukaran mahasiswa angkatan 2018 sebanyak 1 kelas (rombel), dengan jumlah sks 20. Di samping itu juga dilakukan kelas pertukaran dengan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Malang (UM) pada mahasiswa angkatan 2019, masing masingnya sebanyak 1 kelas (20 orang), dengan total sks 20. Kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring via LMS masing masing kampus (Wawancara dengan Anggota Tim Kurikulum Jurusan Sejarah, Firza, 5 November 2022).

Pada tahun 2020 dilakukan lagi pertukaran mahasiswa dengan dua perguruan tinggi, yakni Unimed dan UNRI, sedangkan dengan UM Malang tidak lagi dilanjutkan. Dengan Unimed dilakukan pertukaran mahasiswa pada dua angkatan, yaitu: angkatan 2018 dan 2019, yang masing masingnya 20 orang per angkatan, dengan total sks 20. Sementara dengan UNRI dilakukan kelas pertukaran sebanyak 1 kelas (20 orang), pada mahasiswa angkatan 2019 (Wawancara dengan Anggota Tim Kurikulum MBKM Jurusan Sejarah, Firza, 5 November 2022).

Selanjutnya pada tahun 2021 kerjasama dalam bentuk pertukaran kembali dilanjutkan dengan Prodi Pendidikan Sejarah Unimed, dan Prodi Pendidikan UNRI. Dengan Unimed dilakukan pertukaran sebanyak 1 kelas pada mahasiswa angkatan 2020 dengan 20 sks. Sedangkan dengan UNRI dilakukan pertukaran sebanyak 40 orang mahasiswa, yakni 20 orang dari angkatan 2019, dan 20 orang lagi dengan mahasiswa angkatan 2020, masing masingnya dengan 20 sks (Dokumen MBKM Jurusan Sejarah Tahun 2022).

Di samping Program Pertukaran Pelajar yang dikelola langsung oleh Jurusan Sejarah, pada tahun 2020 sebanyak 5 orang mahasiswa Jurusan Sejarah juga mengikuti Program Pertukaran Pelajar yang dikelola langsung oleh Kemendikbud. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pertukaran tersebut melakukan perkuliahan secara langsung (tatap muka) di kampus yang mereka tuju, diantaranya Universitas Manado, Universitas Tadulako, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Syam Ratulangi (Wawancara dengan Ketua Jurusan Sejarah Rusdi, 8 November 2022).

Pada tahun 2021 sebanyak 10 orang mahasiswa Jurusan Sejarah juga mengikuti Program Asistensi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Sebagian besar mereka ditempatkan di Sekolah Dasar (SD) di daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat sendiri, dan sebagian kecilnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas. Setiap mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Asistensi Mengajar dihargai sebesar 20 sks, dengan pola konversi.

Kendala-Kendala Implementasi MBKM di Jurusan Sejarah

Implementasi MBKM di Jurusan Sejarah masih terbatas pada beberapa skema (Program), yakni: Pertukaran Pelajar dan Asistensi Mengajar. Berdasarkan analisis terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan BBKM di Jurusan Sejarah, sebagai berikut:

a. Kesulitan dalam pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar

Persoalan paling pelik yang dihadapi Jurusan Sejarah dalam kelas pertukaran adalah dalam menentukan mata kuliah yang akan dipertukarkan dan mengkonversinya dalam mata kuliah yang hampir sama, baik dari segi penamaan, maupun bobot SKS. Pada dasarnya struktur mata kuliah yang terdapat di masing masing Prodi berbeda, terutama dari segi penamaan, bobot sks, dan semester yang ditawarkan. Di samping itu walaupun ada nama mata kuliah yang sama, dan dengan bobot SKS yang sama, namun seringkali terdapat perbedaan semester mata kuliah itu keluar (gasal-genap, atau tahun angkatan mata kuliah itu keluar. (Dokumen Kelas Pertukaran Jurusan Sejarah UNP).

Kesulitan lain adalah dalam masalah administrasi akademik, baik ketika pelaksanaan kelas pertukaran, ataupun di akhir kelas pertukaran. Dalam pelaksanaan setiap Jurusan harus mendaftarkan mahasiswa ke dalam

sistem LMS yang ada di perguruan tinggi masing masing. Hal ini juga tidak mudah dilakukan karena ada perbedaan sistem LMS di masing masing perguruan tinggi, sehingga urusan birokrasi menjadi panjang. Demikian juga ketika program kelas pertukaran berakhir, masing masing Jurusan/Prodi harus menyelesaikan urusan nilai ke pihak universitas dengan mengembalikan nama maka kuliah dan SKS sesuai dengan yang ada di Kurikulum Jurusan/Prodi (Wawancara dengan Ketua Jurusan Sejarah Rusdi, 8 November 2022, dan Tendik Jurusan Suci Lestari 20 Desember 2022).

b. Kesulitan dalam melakukan konversi nilai

Persoalan lain yang dihadapi Jurusan adalah dalam hal konversi nilai. Hal ini dialami pada kelas pertukaran yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam skema mahasiswa Permata. Persoalannya adalah mahasiswa sejarah mengikuti program tersebut pada bidang studi yang berbeda (Prodi yang berbeda), bahkan ada yang sangat jauh dari bidang ilmu mereka. Sebagai contoh ada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di Prodi Hukum dan Teknik, sehingga untuk mengkonversi nilai setara dengan 20 sks sebagaimana diinginkan dalam Program ini adalah sangat sukar (Wawancara dengan Mahasiswa eks Permata, Yudha Wiranata, 8 November 2022).

Persoalan konversi nilai juga dialami mahasiswa Jurusan Sejarah yang mengikuti Program asistensi Mengajar. Kebanyakan dari mahasiswa yang mengikuti Program ini ditempatkan di Sekolah Dasar (SD), sedangkan dalam kurikulum Jurusan Sejarah mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi guru di Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam hal ini jelas tidak terdapat kesesuaian antara Program ini dengan tujuan Jurusan/Prodi Sejarah. Lalu ketika mereka sudah melaksanakan Program Asistensi diminta untuk mengkonversi dengan mata kuliah setara dengan 20 sks. Persoalan muncul karena selama di sekolah latihan mereka hanya terlibat dalam aktivitas mengajar, tanpa ada mata kuliah lain yang terkait dengan itu (Wawancara dengan Ketua Jurusan Sejarah, Rusdi 8 November 2022). Tentu amat sukar mengkonversi dengan mata kuliah yang ada, sementara mereka tidak mempelajarinya (Wawancara eks Mahasiswa Asistensi Mengajar Elsi Rahmatika, 10 November 2022).

c. Kurangnya sosialisasi Program MBKM kepada kalangan dosen dan mahasiswa

Dalam pelaksanaan MBKM ternyata masih ada dosen yang belum paham dengan program MBKM, sehingga mereka dari awal sudah pesimis dengan hasilnya. Ketidapahaman ini disebabkan masih kurangnya sosialisai berbagai Program MBKM secara langsung kepada para dosen, baik oleh pihak Universitas, maupun kalangan Kemendikbudristek. Sosialisasi masih bersifat terbatas dan cenderung hanya via informasi dari whatsapp, dan daring (Wawancara dengan Uun Lionar, 10 November 2022). Dalam kondisi yang lain ada dosen yang secara terang terangan menolak Program MBKM karena menghilangkan aspek keilmuan dan kekhasan Jurusan.

Tidak hanya dosen, kebanyakan mahasiswa juga kurang memahami berbagai program MBKM karena kurangnya sosialisasi dari kampus secara langsung, kecuali hanya melalui daring, sehingga terkadang mereka mengikuti Program MBKM yang dikelola oleh kemendikbud tanpa berkonsultasi dengan PA, ataupun jurusan. Akibatnya ada program yang diikuti yang tidak relevan dengan Program Studi, serta ketidakcocokan mata kuliah yang diambil dengan *learning outcome* (Wawancara dengan Mufthi Khamila dan Yudha Wiranata, 10 November 2022).

d. Kesulitan dalam menyamakan persepsi antar Perguruan Tinggi Mitra

Persoalan lain yang dihadapi adalah masih adanya kesulitan untuk menyamakan persepsi dengan jurusan dari universitas lain mengenai MBKM, khususnya Pertukaran Mahasiswa. Dalam hal ini terkadang universitas lain memiliki persepsi yang berbeda seperti MBKM mata kuliah yang diambil harus sama LO nya.

Sementara ada juga Perguruan Tinggi lain yang punya persepsi boleh mengambil mata kuliah yang berbeda sekalipun tidak ada Lo nya (Wawancara dengan Ketua Jurusan Sejarah, Rusdi 10 November 2022) .

e. Perubahan status UNP menjadi WCU (*Word Class University*)

Perubahan status UNP dari BLU menjadi WCU juga memiliki konsekwensi baru terhadap pelaksanaan MBKM di berbagai jurusan di lingkungan UNP, termasuk di Jurusan Sejarah. Salah satunya adalah munculnya kebijakan baru menyangkut kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra. Jika selama ini kerjasama dengan Jurusan Sejarah dengan UNIMED, UNRI, UM Malang tidak ada persoalan, maka dengan perubahan status UNP menjadi WCU kerjasama yang diakui dalam pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) UNP hanyalah dengan perguruan tinggi yang berlevel Q 100, yakni Perguruan Tinggi yang berada di peringkat 100 dunia. Akibatnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang sudah disepakati menjadi tidak dihitung lagi.

Solusi dan Rekomendasi Penerapan Program MBKM

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi Program MBKM di Jurusan Sejarah FIS UNP, maka beberapa solusi yang dapat diajukan dalam perbaikan program dimasa datang adalah: *pertama*, perlu adanya sistem yang terintegrasi di UNP untuk MBKM, dan *dishare* melalui WEB UNP secara berkesinambungan dan reguler. Di samping itu pihak universitas perlu secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada civitas akademika supaya terdapat pemahaman yang sama tentang program MBKM. Cara ini juga dibutuhkan agar informasi mengenai MBKM menjadi jelas, baik tentang prosedur pelaksanaannya, sistem perkuliahan, maupun tentang sistem pengambilan mata kuliah.

Untuk itu tentunya dibutuhkan regulasi aturan yang jelas tentang pelaksanaan MBKM di Universitas Negeri Padang, sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Persoalan ketersediaan dokumen yang lengkap dan jelas amat diperlukan dalam menunjang keberhasilan program MBKM di masa depan. Penelitian Handi Risza di Universitas Paramadina (UPM) menunjukkan bahwa ketersediaan dokumen dan petunjuk pelaksanaannya yang kurang jelas menjadi faktor penghambat pelaksanaan program MBKM di universitas bersangkutan (Risza Handi, 2022) .

Kedua, pelaksanaan berbagai Program MBKM harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan program studi, sehingga tidak ada kewajiban setiap program studi untuk melaksanakan semua Program MBKM. Sebaiknya diberi kesempatan kepada setiap Jurusan/Program Studi untuk memilih dan mengembangkan sendiri program MBKM yang tersedia. Hal ini menjadi penting, sebab jika semua program MBKM dipaksakan ke satu Jurusan/Program Studi, diprediksi itu akan menimbulkan masalah, baik bagi Jurusan/Prodi, dosen, maupun mahasiswa. Sebagai contoh Program Magang kurang cocok dilaksanakan di Jurusan/Program Studi yang berlatar belakang pendidikan. Demikian juga halnya dengan Program Asistensi Mengajar juga kurang relevan dijalankan di Jurusan/Program Studi yang berbasis non pendidikan. Ada baiknya belajar dari pelaksanaan Program MBKM di beberapa perguruan tinggi lain, seperti Universitas Paramadina yang lebih banyak menjalankan Program MBKM dalam bentuk Magang Bersertifikat (Wulandari, 2022)

Ketiga, harus ada aturan yang jelas dan seragam tentang kurikulum MBKM, serta konversi mata kuliah yang dilakukan di dalamnya. Untuk menyikapi dan mengantisipasi munculnya persolan menyangkut konversi mata kuliah, maka Jurusan Sejarah telah membuat aturan konversi mata kuliah dalam 8 skema MBKM sebagai pedoman dan acuan menentukan konversi mata kuliah yang diambil mahasiswa nantinya(Dokumen Kurikulum Jurusan Sejarah Tahun 2020, n.d.). Konversi mata kuliah tersebut seperti tersaji dalam skema berikut:

Tabel 1 Magang

No.	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	Jurnalistik	2

1.	Metode Sejarah	3
3.	Historiografi	3
4.	Kemampuan Inovasi	3
5.	Kemandirian	2
6.	Etika	2
7.	Kemampuan Bekerjasama Dalam Tim	2
8.	Kemampuan memecahkan Masalah	3
Total		20

Syarat konversi mata kuliah:

- 1) Jurnalistik publikasi sebuah artikel atau berita di surat kabar lokal atau nasional
- 2) Metode Sejarah pembuatan proposal penelitian sejarah yang idenya dibangun di tempat magang
- 3) Historiografi resensi sebuah buku yang ada kaitannya dengan tempat magang

Tabel 2 Proyek Desa

No.	Proyek Desa	SKS
1.	KKN	2
2.	Studi Masyarakat Indonesia	2
3.	Sejarah Kebudayaan	2
4.	Sejarah Agraria	2
5.	Kemandirian	2
6.	Etika	2
7.	Kemampuan Kerjasama dalam Tim	2
8.	Kemampuan Memecahkan Masalah	3
9.	Kemampuan Inovasi	3
Total		20

Syarat konversi mata kuliah:

- 1) Studi Masyarakat Indonesia penyusunan sebuah karya ilmiah menyangkut persoalan yang ada di tengah masyarakat dimana Proyek Desa dilakukan
- 2) Sejarah Kebudayaan pembuatan sebuah video pembelajaran yang menggambarkan keunikan budaya masyarakat ditempat proyek dilakukan.
- 3) Sejarah Agraria publikasi sebuah artikel di media lokal atau nasional yang menggambarkan tentang permasalahan agraria/pertanian yang ada di daerah proyek

Tabel 3 Studi Proyek Independen

No.	Studi Proyek Independen	SKS
1.	Metode dan Model Pembelajaran	3
2.	Perencanaan Pembelajaran Sejarah	3
3.	Penilaian Pembelajaran Sejarah	3
5.	Kemandirian	2
6.	Etika	2
7.	Kemampuan Kerjasama dalam Tim	2
8.	Kemampuan Memecahkan Masalah	3
9.	Bimbingan dan Konseling	3

- 431 *Evaluasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Jurusan Sejarah - Etmi Hardi, Ambiyar, Ishak Aziz*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4500>

Total	20
--------------	-----------

Syarat konversi mata kuliah:

- 1) Metode dan Model Pembelajaran pembuatan produk sebuah video pembelajaran
- 2) Perencanaan pembelajaran Sejarah penyusunan Perangkat Pembelajaran/Modul Ajar
- 3) Penilaian Pembelajaran Sejarah penyusunan soal soal Hots minimal 40 butir dalam materi sejarah Indonesia

Tabel 4 Proyek Kemanusiaan

No.	Proyek Kemanusiaan	SKS
1.	Sejarah Sosial	3
2.	Sejarah Kebudayaan	3
3.	Sejarah Perang	2
4.	Sejarah Gender	2
5.	Kemampuan Komunikasi	3
6.	Kemampuan Inovasi	3
7.	Etika	2
8.	Kemampuan Bekerjasama dalam Tim	2
Total		20

Syarat konversi mata kuliah:

- 1) Sejarah Sosial mencari beberapa tema yang bisa dikembangkan untuk riset sejarah
- 2) Sejarah Kebudayaan dan Sejarah Perang menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam bentuk makalah yang menunjukkan adanya hubungan antara kebudayaan dan perang
- 3) Sejarah Gender mahasiswa mencari beberapa isu krusial menyangkut gender

Tabel 5 Pertukaran Mahasiswa

No.	Pertukaran Mahasiswa	SKS
1.	Mata Kuliah Jurusan	20

Syarat konversi mata kuliah:

Dalam skema Pertukaran Mahasiswa konversi mata kuliah dilakukan berdasarkan kurikulum reguler di Jurusan Sejarah pada semester pelaksanaan kelas pertukaran

Tabel 6 Wirausaha

No.	Wirausaha	SKS
1.	Pengantar Kewirausahaan	2
2.	kepariwisataan	2
3.	Aplikasi Bahasa Inggris	2
4.	Sejarah Kota	2
5.	Kewirausahaan	3
6.	Kemampuan Inovasi	3
7.	Etika	2
8.	Kemandirian	2
9.	Kemampuan Bekerjasama dalam Tim	2
Total		20

Syarat konversi mata kuliah:

- 1) Pengantar Kewirausahaan pembuatan sebuah rancangan tentang strategi marketing
- 2) Kepariwisata pembuatan sebuah video digital bertemakan pariwisata untuk dipublish di youtube
- 3) Aplikasi Bahasa Inggris pembuatan sebuah rekaman hasil wawancara dengan satu orang turis asing tentang kewirausahaan
- 4) Sejarah Kota penyusunan sebuah artikel permasalahan perkotaan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi.

Tabel 7 Asistensi Mengajar

No.	Asistensi Mengajar	SKS
1.	Strategi Pembelajaran Sejarah	2
2.	Media dan Multimedia Pembelajaran	2
3.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	3
4.	Program Pengalaman Lapangan 1 (PPL)	1
5.	Program Pengalaman Lapangan 2 (PPL)	1
6.	Program Pengalaman Lapangan 2 (PPL)	3
7.	Kemampuan Komunikasi	3
8.	Kemampuan Inovasi	3
9.	Etika	2
Total		20

Syarat konversi mata kuliah:

- 1) Strategi Pembelajaran Sejarah penyusunan sebuah desain pembelajaran dalam bentuk digital
- 2) Media dan Multimedia Pembelajaran pembuatan content pembelajaran digital menyangkut media yang digunakan
- 3) Pendidikan IPS penyusunan sebuah makalah atau artikel menyangkut pendekatan IPS yang digunakan

Tabel 8 Penelitian/Riset

No.	Penelitian/Riset	SKS
1.	Metode Penelitian Pendidikan	3
2.	Teori Metodologi Sejarah	3
3.	Skripsi	6
5.	Kemampuan Komunikasi	3
6.	Kemampuan Inovasi	3
7.	Etika	2
Total		20

Syarat konversi mata kuliah:

- 1) Metode dan Penelitian Pendidikan penyusunan sebuah proposal pendidikan
- 2) Teori dan Metodologi Sejarah mengidentifikasi tema tema riset sejarah yang bisa dikembangkan untuk penelitian sejarah
- 3) Skripsi mahasiswa dapat memilih dari dua alternatif di bawah ini:
 - a) Melahirkan sebuah artikel (sejarah atau pendidikan sejarah) yang dipublish di jurnal yang terindeks Sinta 4 atau Sinta 5

- b) Membuat produk pembelajaran atau materi sejarah dalam bentuk e-modul, ensiklopedia pendidikan, ensiklopedia sejarah, atau video pembelajaran (pilih salah satu)

Keempat, menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai unsur utama penyelenggara MBKM. Dalam pengamatan terlihat bahwa SDM penyelenggara MBKM belum terlalu andal sehingga sering aturan regulasi yang dijalankan tumpang tindih. Di masa datang diharapkan SDM pengelola MBKM betul betul disiapkan secara baik dan profesional. Di samping itu pihak universitas juga perlu memfasilitasi dan membantu Jurusan/Program Studi dalam hal menjalin kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi yang berada di level 100 dunia, serta kerjasama dengan pemerintah daerah, propinsi, perusahaan swasta, BUMN, dan segala macamnya

Implikasi Penelitian dan Keterbatasan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (UNP). MBKM adalah suatu program dari pemerintah yang wajib dijalankan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Berdasarkan itu sejak tahun 2019 Jurusan Sejarah sudah menjalankan beberapa Program Merdeka Belajar, yakni Pertukaran Pelajar, dan Asistensi Mengajar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar dan Asistesnsi Mengajar masih menemukan kendala, baik yang bersifat internal (Jurusan), maupun yang bersifat eksternal (universitas). Sekalipun demikian secara umum pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar dan Asistensi Mengajar dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan semula, sehingga program ini tetap dilanjutkan pada tahun tahun berikutnya, dengan berbagai penyempurnaan.

Pelaksanaan Program MBKM di Jurusan Sejarah dapat menjadi contoh dari Jurusan/Program Studi sejenis yang ada di Indonesia. Satu persoalan yang paling sulit dalam pelaksanaan Program MBKM dalam berbagai skema adalah dalam melakukan konversi nilai. Dalam hal ini Jurusan Sejarah telah mencoba melakukan dan menawarkan pola aturan dan regulasi konversi nilai yang cukup jelas dan komprehensif, dengan pola Hybrid. Konversi nilai dilakukan secara lengkap dalam delapan (8) skema yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sekalipun demikian penelitian ini memiliki keterbatasan, karena tidak melakukan analisa kuantitatif untuk melihat kecendrungan angka keberhasilan program ini secara statistik, misalnya tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen. Di samping itu pengambilan informan dilakukan secara acak sehingga kurang memberi gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Keterbatasan ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pihak lain yang ingin menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi, baik secara praktis, maupun akademis.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian diperoleh gambaran bahwa Jurusan Sejarah telah berhasil melaksanakan beberapa program MBKM yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek di bawah komando Menteri Pendidikan Nadiem Makarin. Dari 8 skema yang ada Jurusan sejarah sudah mampu mengimplementasikan dua skema secara baik, yakni Pertukaran Pelajar dan Asistensi Mengajar. Pertukaran Pelajar sudah dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi negeri, seperti UM Malang, Unimed, dan UNRI. Sekalipun masih terdapat kesulitan dan hambatan konversi nilai dalam program MBKM, namun hal itu bisa diatasi dengan membuat sejumlah aturan menyangkut konversi. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya sebuah keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu berdikari.

- 434 *Evaluasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Jurusan Sejarah - Etni Hardi, Ambiyar, Ishak Aziz*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4500>

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiyar Dan Muharika Dewi. (2022). *Model Dan Pendekatan Evaluasi Program*. Cv. Muharika Rumah Ibadah.
- Ananda, R., Rani, A. R., & Fadhilaturrahmi, F. (2022). Pengembangan Model Tpack Untuk Menunjang Kompetensi Profesional Pada Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 9064–9069.
- Anggita, Miranti Yolanda, Dkk. 2021. “Realisasi Dan Evaluasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Studi Sarjana Fisioterapi Universitas Esa Unggul”, *Jurnal Forum Ilmiah* Volume 18 No. 4 Desember 2021
- Dirjend Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Mengajar (Mbkm)*. Dirjend Pendidikan Tinggi.
- Dokumen Kurikulum Jurusan Sejarah Tahun 2020*. (N.D.).
- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru Dalam Kurikulum Prototipe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1544–1560.
- Faiz, Aiman, Purwati. 2021. Koherensi Program Pertukaran Pelajar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dan General Education. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 3 Nomor 3 Tahun 2021 Halm 649 – 655
- Fuadi, Tuti Marjan, Dian Aswita. 2021. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, Vo. 5, No. 2, Juli 2021 : 603-614.
- Fuadi, Tuti Marjan, Dian Aswita. 2021. “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh”. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, Vo. 5, No. 2, Juli 2021 : 603-614.
- Risza Handi, Dkk,. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Oleh Pimpinan Universitas Paramadina (Upm)*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* Februari 2022, Vol. 4, No. 1, Hal. 1-14.
- Susetyo, S. (2020). *Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fkip Universitas Bengkulu*. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 29–43.
- Susilawati, N. 202). *Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme*. *Jurnal Sikola*, Vol. 2 (3): 203-219
- Tayibnafis, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tohir M. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (Kesatu)*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Triastuti, Ida Ayu, Dkk. 2022. “Evaluasi Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Pada Fakultas Kedokteran”, *Http://Ejournal.Ukrida.Ac.Id/Ojs/Index*, Vol 3, Hal 269-277
- Ulandari, L. U., Ridha, A. R., Rozalita, D. R., Ananda, R. A., & Witarsa, R. W. (N.D.). Analisis Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. *Jikap Pgsd: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 6(3), 584–590.
- Wulandari, D. Dkk. (2022). *Evaluasi Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Di Tingkat Program Studi: Studi Di Universitas Paramadina*. *Jurnal Inquiri*, Vol.13, No. 1 Juli 2022, Hal. 22 - 40